



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMSUL BAHRUN

Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK : 713376

II. DATA HARTA

Δ	TANAH DAN BANGUNAN	al Rn	670,000,000
Λ.	I ANAII DAN DANGUNAN	IND.	07 0.000.000

- Tanah Seluas 1.167 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah Seluas 7.408 m² di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, WARISAN Rp. 120.000.000
- Tanah Seluas 12.360 m² di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.000.000

- MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
- MOTOR, YAMAHA MIO 28D MIO / DL 1155 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	No.
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	130.000.000
Sub Total	Rp.	915.000.000
III. HUTANG	Rp.	K KA
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	915.000.000

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

